



Kejaksaan Lidik Kasus Dugaan Korupsi Tirtayatra ke India

DENPASAR, NusaBali

Setelah sempat obok-obok Pemkot Denpasar terkait dugaan korupsi dua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) setempat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar kini juga mendalami kasus serupa di salah satu SKPD lingkup Pemkab Badung. Kasus yang disasar kejaksaan kali ini adalah dugaan korupsi perjalanan spiritual Tirtayatra ke India yang digelar Dinas Kebudayaan Badung tahun 2013.

Informasi yang dihimpun NusaBali, Minggu (12/4), menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam kegiatan spiritual Tirtayatra ke India ini masih dalam proses pengumpulan data dan informasi. Dalam kegiatan Tirtayatra ke India yang menelan anggaran hampir Rp 1 miliar itu diduga terdapat beberapa penyelewengan. "Nah, dugaan penyelewengan inilah yang masih terus didalami penyidik Kejari Denpasar," ujar sumber

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Kejaksaan Lidik Kasus Dugaan Korupsi...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

NusaBali di Kejari Denpasar, Minggu kemarin.

Disebutkan, kegiatan spiritual Tirtayatra ke India tahun 2013 diselenggarakan Dinas Kebudayaan Badung dengan menggunakan anggaran APBD. Namun, hingga saat ini belum diketahui bagaimana modus dugaan korupsi tersebut dan siapa saja yang terlibat. "Sekarang masih tahap pengumpulan data dan wawancara beberapa pihak terkait," tegas sumber tadi.

Sayangnya, pihak Kejari Denpasar belum ada yang memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyelewengan dalam kegiatan spiritual Tirtayatra ke India di Dinas Kebudayaan Badung. Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir, juga belum berhasil dimintai konfirmasi. Berulang kali dihubungi per telepon, Minggu kemarin, Syahrir tidak mengangkat ponselnya.

Namun sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar, Imanuel Zebua, sempat mengungkapkan pihaknya sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung. Namun, Emanuel enggan menjelaskan secara spesifik korupsi yang terjadi. Yang jelas, kata dia, yang diselidiki di Pemkab Badung adalah dugaan korupsi dalam perjalanan spiritual Tirtayatra.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Badung, Ni Luh Suryaniti, menyatakan keganjilan dalam perjalanan spiritual Tirtayatra ke India tahun 2013 sudah diselesaikan. Luh Suryaniti mengakui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali memang pernah memberikan catatan terhadap APBD Badung 2013. Salah satunya, masalah perjalanan dinas ke India.

Tapi, kata Suryaniti, hal itu sudah ditindaklanjuti dan sekarang tidak ada permasa-

lahan lagi. "Itu sudah diselesaikan dan tidak ada masalah. Lagipula, tidak ada kerugian negara di situ. Dalam Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Badung tahun 2014, BPKP Provinsi Bali memang sempat memberikan catatan, tapi itu sudah selesai," tegas Suryaniti saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Badung, Minggu kemarin.

Proposal pada Dinas Kebudayaan Badung untuk kegiatan perjalanan spiritual Tirtayatra ke India tahun 2013 itu sendiri sebesar Rp 916 juta dan dinilai BPKP Provinsi Bali kurang akurat. Masalahnya, persetujuan proposal dengan dana hibah Rp 893.113.500 (Rp 893,11 juta) tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaan. Menurut Suryaniti, tidak dicantumkannya jangka waktu pelaksanaan Tirtayatra itu hanya sebatas persoalan administrasi saja. **rez,as**

Edisi : Senin, 13 April 2015

Hal : 1



Pemkab Terancam Kehilangan Rp 69 Juta dari Pasar Sangsit

SINGARAJA, NusaBali

Pengalihan Pasar tradisional di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, berimbas pada berkurangnya pendapatan pemerintah hingga puluhan juta. Berdasar kajian dari PD Pasar dan Badan Pengawas, Pemkab Buleleng diperkirakan kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 38 juta. Sedangkan PD Pasar Sendiri kehilangan sekitar Rp 31 juta.

Rencananya, kajian itu akan disampaikan dalam pekan ini pada Pemkab untuk dibahas selanjutnya. "Sudah, mungkin pekan ini kita sampaikan kepada pak bupati. Mekanismenya nanti kita serahkan selanjutnya pada pemerintah," kata Direktur Utama (Ditur) PD Pasar, Putu Gede Sadwikayadnya, Minggu (12/4).

Dijelaskan, berkurangnya sumber pendapatan itu berdasar atas estimasi pendapatan yang disusun selama setahun di tahun 2015. Disebutkan, dari Pasar Sangsit, estimasi pendapatan setahun dirancang sekitar Rp 117 juta. Dari estimasi pendapatan itu, kemudian dibagi dengan rincian untuk PD Pasar sekitar Rp 31 juta, Pemkab Buleleng sebagai PAD sekitar Rp 38 juta dan bagi hasil untuk Desa Sangsit sebesar Rp 48 juta. "Nah, nanti kalau keputusannya, pasar itu dikelola oleh pihak adat, tentu harus dibicarakan lagi tentang bagi hasilnya, berapa nanti pihak desa memberikan kontribusi ke pemerintah sebagai PAD," jelas Sadwikayadnya.

Menurut Sadwikayadnya, pembahasan lebih lanjut atas pengalihan pengelolaan Pasar Sangsit itu untuk menentukan apakah pengalihan itu cukup hanya berbekal surat keputusan atau peraturan bupati atau dengan merubah Perda Pasar yang ada. PD Pasar akan menyerahkan sepenuhnya pada Pemerintah dan Lembaga DPRD Buleleng. "Nanti kan ada pembahasan lebih lanjut,

karena ini harus juga mendapat persetujuan DPRD Buleleng," katanya.

Disisi lain Sadwikayadnya juga menyinggung masalah kewajiban para pedagang dalam membayar cukai harian. Masalahnya, saat ini ada sejumlah pedagang di Pasar Sangsit yang sama sekali tidak mau melunasi kewajibannya. Sedangkan PD Pasar harus tetap memberikan pelayanan yang harus dilunasi tiap bulan seperti rekening listrik dan biaya sampah. "Semestinya sebelum ada hitam diatas putih tentang pelimpahan pengelolaan pasar itu, pedagang harus tetap mengikuti regulasi yang ada. Dimana kewajiban-kewajiban yang ada harus tetap dilunasi," ungkapnya.

Sadwikayadnya mengaku, untuk operasional di Pasar Sangsit, PD Pasar harus menyiapkan dana minimal sekitar Rp 690 juta untuk membayar biaya listrik dan sampah. Selama ini, biaya itu diambilkan dari pedagang lewat cukai harian. Namun semenjak ada wacana pengambil alihan pasar itu, tidak sedikit pedagang yang menolak membayar kewajibannya.

"Setiap kali kita menagih cukai harian itu, selalu saja ada pedagang yang melarang membayar. Bahkan petugas kita selalu diintimidasi, karena tidak dibayar itu, kami yang harus menalangi dulu untuk bayar listrik dan sampah itu. Kalau listrik tidak kita bayar, pasar itu akan gelap, nah siapa disalahkan, pasti ujung-ujungnya kami disalahkan," keluhnya.

Sebelumnya, warga Sangsit menghendaki agar Pasar Sangsit dikelola oleh pihak desa. Karena, tanah yang dipakai pasar itu adalah tanah milik adat. Disamping itu, kontribusi ke desa juga dianggap terlalu kecil Rp 3 juta perbulan. Pengelolaan oleh PD Pasar juga dituding merugikan warga Sangsit yang berjualan di pasar, akibat tingginya pungutan. **k19**

Edisi : Senin, 13 April 2015

Hal : 4



3 Desa Dibidik Penyimpangan Dana GSM



• NUSABALI/LIK
AKP Ketut Adnyana TJ

Tiga desa jadi target polisi itu satu diantaranya adalah Desa Banyuseri di Kecamatan Banjar, dengan potensi kerugian Rp 30 juta. Dua lainnya di Tejakula dan Busungbiu.

SINGARAJA, NusaBali
Sebanyak tiga desa di tiga Kecamatan di Buleleng saat ini sedang diincar oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim)

Polres Buleleng. Ha tersebut dikarenakan diduga telah terjadi indikasi penyelewengan dana bantuan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara senilai puluhan juta yang diberikan Pemerintah Provinsi Bali kepada masing-masing desa yang ada di Bali.

Dalam penyelidikan yang sampai saat ini tengah digencarkan, ketiga desa tersebut diduga ada penyalahgunaan wewenang dan unsur memperkaya diri sendiri, dalam pemanfaatan dana tersebut.

"Saat ini sedang kami incar tiga desa. Satu diantaranya adalah Desa Banyuseri di Kecamatan Banjar, dengan potensi kerugian Rp 30 juta. Ada juga satu desa lagi di Kecamatan Tejakula, ada juga satu desa di Kecamatan Busungbiu," kata

Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Ketut Adnyana TJ, Minggu (12/4).

Menurut AKP Adnyana, ketiga desa itu terindikasi menyebabkan kerugian negara. Hanya saja ia enggan memberi perincian mengenai besaran dana GSM dan modus penyimpangan yang diduga diselewengkan oleh desa-desa selain Desa Banyuseri, yang diduga menyebabkan kerugian negara. Alasannya seluruh desa itu masih dalam tahap penyelidikan.

Sebelum melanjutkannya ke tahap penyidikan, polisi akan melakukan ekpose perkara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali. Setelah melakukan ekpose, polisi segera melanjutkan ke tahap penyidikan.

Ia pun menegaskan tak ingin

terburu-buru dalam menyelesaikan kasus korupsi, mengingat sifat kasusnya yang khusus. "Tidak usah terburu-buru, karena kami harus berhati-hati menangani kasus-kasus korupsi. Intinya kami tidak ingin lepas," tandasnya.

Sementara sampai saat ini polisi baru menuntaskan satu kasus korupsi penyelewengan dana GSM. Kasus itu terjadi di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, dan melibatkan Nengah Wijaya, mantan Perbekel Julah yang menyelewengkan dana gerbang sadu hingga Rp 200 juta. Ia mengatakan kemungkinan penambahan jumlah kasus yang sama sangat berpotensi. Karena pihaknya terus melakukan penyelidikan dan pengecekan khusus untuk penggunaan dana bantuan GSM. **k23**

Edisi : Senin, 13 April 2015

Hal : 4



Dugaan Korupsi Pavingisasi Gajah Mada Teliti Berkas, Jaksa Beri Petunjuk Tambahan

DENPASAR, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar mengembalikan berkas perkara dugaan korupsi pavingisasi di Jalan Gajah Mada, Denpasar yang sudah menetapkan dua tersangka kepada Polresta Denpasar. Pasalnya, dari berkas dua tersangka yaitu Alit Widhiadnyana (Direktur PT Alit Wirajaya) dan Ngurah Kosala Cakrawethi (Direktur CV Unika Desain) masih banyak kekurangan.

Salah seorang jaksa peneliti Kejari Denpasar, Yusmawati mengatakan setelah memeriksa berkas kasus dugaan korupsi pavingisasi Gajah Mada, pihaknya akan mengembalikan berkas tersebut ke Polresta Denpasar alias P-19.

Dalam P-19 tersebut, pihak kejaksaan memberikan banyak petunjuk baru untuk menutupi kekurangan dalam berkas yang sudah dikirimkan. "Usai melakukan penelitian, kami sudah mempersiapkan P19 untuk menjadi petunjuk oleh penyidik Poltabes untuk menyempurnakan berkas," ujar Yusmawati, Jumat (10/4).

Mengenai kapan akan dikirim balik berkas beserta P19 tersebut, pihaknya mengaku masih berkordinasi dulu dengan atasannya. Setelah dirasa cukup, baru akan dikirim. "Kami harus kordinasi dulu," pungkasnya.

Sementara itu, sampai saat ini penyidik Kejari Denpasar baru menerima dua berkas tersangka dalam

kasus ini yaitu Direktur PT Alit Wirajaya, Alit Widhiadnyana yang menggarap proyek pedestrian Jalan Gajah Mada dan Direktur CV Unika Desain, Ngurah Kosala Cakrawethi sebagai konsultan pengawas proyek pedestrian Jalan Gajah Mada.

Sementara, satu tersangka lainnya yang disebut sebagai salah seorang pejabat di Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) Kota Denpasar berkasnya belum dikirimkan. Dalam kasus dugaan korupsi ini, diduga negara dirugikan hingga Rp 201 juta. "Infonya memang ada tiga tersangka. Tapi yang berkasnya sampai di kami hanya dua tersangka," tambah Kasi Pidsus Kejari Denpasar, Wayan Sutarjana. rez